

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dari tahun 2016 ke 2021, Kemitraan Bisnis APEC-Canada (“Kemitraan”) telah mencari pembangunan kapasitas perusahaan-perusahaan mikro, kecil dan menengah (MSME) dalam ekonomi berkembang di wilayah Koperasi Ekonomi (APEC) Asia-Pasifik. Tujuan dari kemitraan adalah untuk membangun kapasitas dari MSME menuju tujuan akhir dari promosi mengurangi kemiskinan dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah Asia-Pasifik. Kemitraan menyadari peran utama MSME dalam penyediaan kesempatan-kesempatan ekonomi langsung ke masyarakat lokal dalam ekonomi APEC, sementara juga menyumbang ke pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di wilayah. APF Canada telah menerapkan program 4 tahun dengan fokus atas penelitian pelatihan, dan pembimbingan dari MSME dengan tujuan akhir dari menawarkan peralatan dari praktek yang berhasil, saran-saran, pengetahuan di seputar membimbing pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Sementara MSME mempunyai potensi besar sekali untuk mencapai tujuan-tujuan ini, bisnis-bisnis kecil ini menghadapi tantangan-tantangan untuk perkembangan dan kesuksesan mereka. Kemitraan telah menjelajahi untuk membangun kapasitas MSME dalam tema untuk empat bidang utama: teknologi dan inovasi, modal sumber daya manusia, akses pasar, dan kewiraswataan. Sekarang dalam penerapan tahun terakhir, sebagai MSME di wilayah APEC bergulat dengan dampak jangka pendek dan jangka pendek dari pandemi COVID-19, Kemitraan lebih lanjut memeriksa penelitian dan aktivitas-aktitas di lapangan yang telah dilakukan di Indonesia, Peru, Filipina dan Vietnam, dengan tujuan untuk mengilustrasi tantangan-tantangan pra-pandemi COVID-19, dan mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangan dan prioritas-prioritas dari zaman “normal baru” selama masa pandemi COVID-19. Dalam laporan ini, Kemitraan telah mngumpulkan pengalaman praktek-praktek berhasil dan pelajaran-pelajaran yang telah terpelajari langsung di lapangan dan bekerja dengan bermacam-macam proyek pemangku jabatan termasuk pemerintahan, jaringan kewiraswataan, akademis dan lebih utama lagi yaitu MSME sendiri.

Makalah kebijakan batu penjuror menyoroti penemuan-penemuan kebijakan kunci dan rekomendasi-rekomendasi sepanjang siklus penerapan Kemitraan dalam menanggapi tema untuk enam bidang kunci yang diunggulkan dalam konperensi proyek batu penjuror. Tema-tema ini adalah sebagai berikut:

1. Mempromosi Pertumbuhan Inklusif
2. Mendukung Perusahaan-perusahaan Perempuan dan Kaum Muda.
3. Membantu Transformasi Digital MSME
4. Menjamin Akses Pembiayaan MSME

5. Memastikan Akses Layanan-layanan Dukungan MSME

6. Mendorong Akses Pasar yang Lebih Luas

Dalam menanggapi tema-tema ini, makalah mengunggulkan penemuan-penemuan pengalaman-pengalaman pelaksanaan lapangan MSME di Indonesia, Peru, Filipina, Vietnam dan analisa lintas national dari himpunan data survei projek nasional. Makalah ini bertujuan untuk menarik perbandingan-perbandingan dari menjalankan suatu MSME dalam ekonomi empat fokus Kemitraan, dan lapangan yang mereka jalankan. Dalam melakukannya, makalah ini menyediakan rekomendasi-rekomendasi dari membangun kapasitas di masa depan, selama pandemi COVID-19 dan seterusnya.

Rekomendasi-rekomendasi kebijakan dalam laporan ini adalah berdasarkan bukti-bukti kualitatif dan kuantitatif yang diambil dari kegiatan-kegiatan lapangan Kemitraan dan himpunan data survei nasional. Rekomendasi-rekomendasi diatur oleh visi-visi dan kerangka-kerangka MSME regional, terutama Rencana strategi untuk 2020-2025 dari APEC SMEWG dan Visi Putrajaya 2040.

Rekomendasi-rekomendasi dari kebijakan utama yang disediakan oleh laporan ini termasuk sebagai berikut:

1. Mempromosikan Pertumbuhan Inklusif: Dialog antara pemerintahan, MSME dan pemangku kepentingan lainnya adalah sangat kritis untuk mencapai tanggapan kritis inklusif dan jalan-jalan menuju pemulihan yang dapat berkelanjutan. Pemerintahan harus memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan bisnis kecil diatasi melalui rencana-rencana pelaksanaan yang bekerja menuju pemulihan ekonomi jangka panjang.
2. Mendukung Pengusaha-pengusaha Perempuan dan Kaum Muda: Pembangunan kapasitas lebih lanjut, pengetahuan jaringan dan pengumpulan data terpisah dibutuhkan untuk mengatasi kendala-kendala sistemik yang membatasi pemberdayaan perempuan dan kaum muda.
3. Membantu Transformasi Digital: Para pembuat kebijakan harus menilai usaha-usaha MSME yang sudah ada untuk memadukan suatu strategi digital ke dalam macam bisnis mereka, dan menyediakan dukungan tambahan untuk digitalisasi, seperti infrastruktur ICT yang lebih kuat dan meningkatkan ketrampilan dalam penggunaan media sosial.
4. Menjamin akses ke Pendanaan: Pemerintahan harus membuat akses ke pembiayaan dan beragam mekanisme pembiayaan yang dikenal baik, dapat diakses, demikian juga ditujukan khusus untuk kebutuhan-kebutuhan para pengusaha MSME (contoh: oleh ukuran perusahaan, industri, jenis kelamin dan umur). Kebutuhan-kebutuhan ini dapat diakses melalui pengumpulan data.

5. Memastikan Akses ke Layanan-layanan Dukungan: Pemerintahan didorong untuk menginvestasi lebih banyak sumber-sumber daya dalam marketing dan penyebaran informasi dari program-program dan layanan-layanan dukungan MSME, dan mengarahkannya ke para pengusaha perempuan dan kaum muda.
6. Mendorong Akses Pasar Lebih Luas: Para pengusaha dan MSME harus didukung oleh para pejabat pemerintahan dalam mendapatkan pengalaman pasar internasional dan memperluas pasaran luar negeri mereka. Termasuk menginvestasi dalam promosi yang jelas akan kesempatan-kesempatan internasional, dan peningkatan ketrampilan para pengusaha untuk berpartisipasi dalam pasaran internasional.